

Per
S
P

SKRIPSI

EVA SETYORINI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM RAHASIA BANK YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PEGAWAI BANK



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM
RAHASIA BANK YANG DILAKUKAN OLEH
MANTAN PEGAWAI BANK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai penulisan akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar
Sarjana Hukum

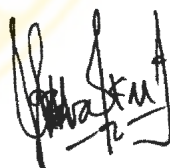
Dosen Pembimbing,



Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

NIP. 130 287 031

Penulis,



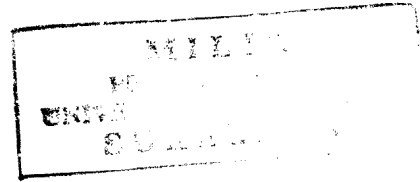
Eva Setyorini

NIM. 039714469

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP



1. Kesimpulan

- a. Dasar hukum rahasia bank terdapat dalam Pasal 40-47 A UU No. 10 Tahun 1998. Yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah tersebut. Ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam Pasal 40-47 A UU No. 10 Tahun 1998 berlaku hanya untuk pegawai bank yang masih aktif bekerja di bank tersebut. Jadi kalau terjadi pelanggaran akan sangat mudah diselesaikan yaitu dengan diterapkannya sanksi seperti yang telah diatur dalam Pasal 47-47 A UU No. 10 Tahun 1998. Tetapi akan sangat sulit untuk menangani sebuah kasus apabila terjadi pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank oleh mantan pegawai bank. Sanksi dalam UU No. 10 Tahun 1998 tidak dapat diterapkan karena dalam UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur ketentuan hukum rahasia bank untuk mantan pegawai bank. Tetapi mantan pegawai bank tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk memegang teguh rahasia bank berdasarkan etika yang ada.
- b. Mekanisme perlindungan hukum untuk nasabah yang paling tepat digunakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank oleh mantan pegawai bank adalah pembuatan peraturan baru dan pelaksanaan peraturan yang sudah ada. Sebagai pelaksanaan dari mekanisme perlindungan hukum

tersebut adalah bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh mantan pegawai bank yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank dapat menuntut ganti rugi kepada mantan pegawai bank tersebut. Tuntutan ganti rugi tersebut dapat diselesaikan dengan jalan membuat akta perdamaian atau mengajukan tuntutan ke pengadilan atas dasar perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sesuai dengan Pasal 1365 B.W. .Dan untuk meringankan beban nasabah dalam hal pembuktian dapat dilakukan penyimpangan terhadap prinsip tanggunggugat yaitu dengan menggunakan prinsip tanggunggugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian dan prinsip tanggunggugat mutlak atau strict liability.

2. Saran

- a. Selama ini tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai ketentuan hukum rahasia bank untuk mantan pegawai bank. Oleh sebab itu etika dapat dijadikan pedoman oleh mantan pegawai bank untuk tetap menyimpan keterangan yang termasuk dalam ruang lingkup ketentuan hukum rahasia bank. Seyogyanya dibentuk kode etik profesi di bidang perbankan untuk mantan pegawai bank, karena selama ini baru terdapat kode etik profesi di bidang perbankan untuk pihak-pihak yang masih aktif bekerja di bank.
- b. Untuk lebih menjamin kepastian hukum sebaiknya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan baru yang khusus mengatur tentang ketentuan hukum rahasia bank bagi mantan pegawai bank atau menambahkan ketentuan hukum

rahasia bank bagi mantan pegawai bank dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Pembentukan peraturan perundang-undangan baru ini dimaksudkan supaya semakin jelas hak dan kewajiban mantan pegawai bank berkaitan dengan ketentuan hukum rahasia bank.

